

## BAB II

### KONDISI PEREKONOMIAN MASYARAKAT TAHUN 1956-1959

#### 2.1 Kondisi Perekonomian Pribumi Tahun 1956-1959

Euforia rakyat Indonesia setelah kemerdekaannya pada 1945 dengan mengambil alih perusahaan-pedusahaan Belanda di Nusantara. Perusahaan-perusahaan yang berhasil diambil alih atau dinasionalisasi ialah, *Koninklijke Pakketvaart Maatschappij* (KPM)<sup>51</sup>, yaitu sebuah perusahaan pelayaran milik Belanda yang merupakan transportasi dagang dari Belanda menuju Indonesia, perusahaan lain yang berhasil direbut ialah lapangan-lapangan minyak serta pengilangan minyak.<sup>52</sup> Euforia tersebut ternyata setidaknya telah melupakan dua hal yang seharusnya dipersiapkan dan dimiliki, yaitu modal dan keterampilan. Pengalaman dalam menata perekonomian serta belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.<sup>53</sup> Kedua hal tersebut merupakan hal yang sangat vital. Mereka belum terlatih untuk menjalankan perusahaan-perusahaan besar tersebut. Peningkatan sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan reformasi ekonomi, sehingga dengan keterampilan yang dimiliki mampu bersaing dengan perusahaan lain.<sup>54</sup>

Kondisi perekonomian pribumi pada tahun 1950-an dapat diketahui dari pernyataan Mr. Assaat ketika berpidato di Kongres Importir Nasional Surabaya. Pernyataan bahwa pribumi sulit dalam mendapatkan akses perekonomian. Mereka hidup sederhana dibanding dengan etnis Tionghoa. Sebagai contoh bahwa etnis Tionghoa memiliki mobil, sementara pribumi harus berjalan kaki, kemudian

---

<sup>51</sup> KPM merupakan perusahaan pelayaran yang sangat penting pada pelayaran antar pulau di Hindia Belanda, hal ini karena KPM berperan sebagai lalu lintas bagi perekonomian nasional. Jalur pelayaran KPM berkembang sampai ke Afrika Selatan, Australia, dan negara-negara berkembang yang besar lainnya. KPM didirikan pada tahun 1888 oleh Belanda dengan kantor pusat operasinya di Batavia. Meski demikian, kedudukan hukumnya berada di Amsterdam (Sonia Ayuning Pangesty, 2023, 10-11).

<sup>52</sup> Ratna Puspitasari, *Multikulturalisme Dalam IPS: Pengenalan Relasi Sosial Etnis Tionghoa Dalam Integrasi Bangsa (Studi Kritis Kajian Relasi Gender Antar Etnis di Indonesia)* (*Jurnal Edueksos*, III, 2, 2014), hlm. 3.

<sup>53</sup> Adi Sudirman, *Sejarah Lengkap Indonesia Dari Era Klasik Hingga Kini* (Jogjakarta: Diva Press, 2014), hlm. 377.

<sup>54</sup> Didin S. Damanhuri dan Muhammad Findi, *Masalah dan Kebijakan: Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 103.

pribumi mengayuh becak, sementara etnis Tionghoa duduk di becak sebagai penumpang, dan semua fasilitas terbaik di kereta api, bahkan semua tempat hiburan umum yang paling indah ditempati oleh etnis Tionghoa.<sup>55</sup>

Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi peninggalan jaman kolonial. Bangsa Indonesia juga sedang mengalami kesulitan dalam perekonomian, karena bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan sosial, politik, dan keamanan yang besar, sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat tidak mengalami peningkatan, bahkan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang kepemilikannya merupakan orang asing, kegiatan perekonomiannya cenderung berorientasi pada ekspor. Di samping kondisi perekonomian yang tidak stabil, pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat.<sup>56</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sebagai upaya stabilisasi ekonomi ialah berupa rehabilitasi struktur perekonomian. Mereka berusaha memperbaiki perekonomian sebagai tindak lanjut pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan program yang lebih menekankan pada pemulihan dan perbaikan keadaan.<sup>57</sup> Kondisi pengusaha pribumi cenderung tidak berkembang. Kedudukan pengusaha pribumi kurang mampu dalam menyusun kekuatan untuk mengatasi situasi perekonomian yang tidak stabil. Pengusaha pribumi kebanyakan dari mereka merupakan kelanjutan pengusaha sebelum perang, seperti pengusaha batik, rokok kretek, karet kopra, bisa dikategorikan kebanyakan merupakan pengusaha-pengusaha kecil. Pengusaha pribumi umumnya mengeyam pendidikan yang tidak sebanding dengan pengusaha-pengusaha asing, sehingga kemajuan dalam mengembangkan usahanya kurang begitu maksimal. Mereka tidak mampu

---

<sup>55</sup> Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Jakarta: Equinox Publishing, 2007), hlm. 482.

<sup>56</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu, 2005), hlm. 358.

<sup>57</sup> Akhmad Syaekhu Rakhman dan Arief Hidayat, Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) (*Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 2022), hlm. 5.

menghadapi pengusaha-pengusaha asing yang modalnya lebih besar. Hal demikian membuat pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.<sup>58</sup>

Pemerintah menasionalisasi perusahaan asing sebagai upaya dalam perbaikan ekonomi Indonesia. Pemerintah ternyata belum siap untuk menyiapkan tenaga kerja yang terampil, mengingat pada waktu sebelumnya mereka disibukkan oleh kegiatan politik atau militer dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan, orang-orang yang mengelola perusahaan besar tersebut belum berpengalaman, maka banyak di antara perusahaan tersebut bukan semakin berkembang malah semakin lemah. Keadaan yang semakin melemah inilah yang kemudian membuat etnis Tionghoa mendapatkan kesempatan. Etnis Tionghoa secara cepat menguasai kegiatan ekonomi yang pada awalnya telah dinasionalisasi oleh pemerintah, namun karena pribumi belum siap dalam menjalankan perusahaannya, baik dari segi keterampilan maupun pengalaman.<sup>59</sup>

Permasalahan yang muncul bukan hanya pada pengusaha-pengusaha kecil saja, namun kurangnya pengalaman dari aparaturnya negara dalam melaksanakan dan mengawasi rencana tersebut secara birokratis juga berpengaruh pada perusahaan yang dijalankannya. Kondisi demikian tidak menyurutkan kabinet yang silih berganti untuk berusaha mewujudkan struktur perekonomian nasional, namun pada masa Demokrasi Parlementer ternyata belum dapat terwujud karena kabinet secara cepat jatuh bangun sehingga sebelum kebijakan suatu kabinet tuntas, ternyata kabinet sudah berganti. Kegagalan dalam upaya untuk mewujudkan ekonomi nasional, diartikan sebagai kegagalan mengatasi dominasi perusahaan-perusahaan asing. Konferensi Meja Bundar yang ditandatangani para pemimpin republik di Den Haag pada tahun 1949 memuat kesepakatan berupa jaminan bahwa hak-hak yang diberikan kepada modal asing akan dihormati. Hal itu berarti bahwa perusahaan-perusahaan asing yang berada di Indonesia tetap mendominasi

---

<sup>58</sup> Sukainah, Kebijakan Ekonomi Benteng dan Dampaknya di Surabaya Tahun 1950-1955 (*Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 2016), hlm. 1233.

<sup>59</sup> Nur Hidayah dan Retno Winarni, Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember Dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi Pada Tahun 1998-2012 (*Publika Budaya*, 2(2), 2014), hlm. 23.

perekonomian nasional yang bersifat sentral. Meskipun kedaulatan telah diakui, namun perkembangan ekonomi tidak mengalami perubahan dari periode kolonial Hindia-Belanda. Perusahaan-perusahaan asing tetap mengendalikan sektor perekonomian yang utama.<sup>60</sup>

Para pengusaha pribumi hanya bidang industri kerajinan tangan yang merupakan usaha berskala kecil. Industri dengan skala besar seperti ekspor masih dikuasai oleh modal asing. Dominasi perusahaan asing begitu luas dan mereka cukup kuat dalam hal modal serta keterampilan. Mereka menguasai perdagangan besar, seperti ekspor dan impor. Bidang perhubungan seperti yang dimiliki oleh pemerintah yaitu perusahaan pelayaran pemerintah PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) sangat sulit untuk mengatasi monopoli *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), perusahaan pelayaran milik Belanda. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyaris seluruh sektor perekonomian modern di Indonesia sampai akhir tahun 1957 masih dikuasai oleh orang-orang asing. Kondisi perekonomian tersebut menyebabkan rasa frustrasi bagi sebagian besar pemimpin Indonesia. Perwujudan ekonomi nasional akan selalu terhalang selama modal asing masih beroperasi bahkan berkuasa di Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi. Pada 31 Desember yaitu dalam UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia.<sup>61</sup>

Negara dengan kedaulatannya dimungkinkan mengambil alih kepemilikan bahkan bisa menasionalisasi perusahaan dan seluruh aset investor atas nama kepentingan umum. Hal ini sebagaimana terjadi di Indonesia sejak tahun 1956, ketika Pemerintah Republik Indonesia mulai menasionalisasi beberapa perusahaan asing samapi puncaknya berlanjut pada 31 Desember 1958 dengan diundangkannya UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 (PP No. 23/1958)

---

<sup>60</sup> I Gusti Ag.A.Mas Triwulandari dan I Nyoman Budiana, Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing di Indonesia (*Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 2018), hlm. 12-13.

<sup>61</sup> *Ibid.*

tentang Penempatan Perusahaan Belanda di Bawah Penguasaan Pemerintah Republik Indonesia. Akibat dari undang-undang tersebut ialah sebanyak 90 persen produk perkebunan beralih ke tangan Pemerintah Indonesia, 90 persen dari perdagangan mancanegara dari Indonesia yang dikuasai Belanda di Indonesia beralih ke pemerintah Indonesia.<sup>62</sup>

Nasionalisasi perusahaan asing dengan adanya undang-undang yang mendasarinya, yaitu munculnya UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda. Hal tersebut merupakan awal mula dari perusahaan negara yang kini dikenal sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara).<sup>63</sup> Dominasi usaha asing telah mendorong pemerintah pada masa demokrasi parlementer untuk melakukan nasionalisasi dengan kebijakan-kebijakan yang telah dicanangkan, diantaranya Kebijakan Ekonomi Assaat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959. Etnis asing yang banyak terimbas oleh pelaksanaan peraturan tersebut ialah etnis Tionghoa yang bermukim di pedesaan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 10 Tahun 1959 sebagai upaya untuk melindungi usaha pribumi dengan membatasi usaha etnis asing yang pada praktiknya tertuju pada etnis Tionghoa yang berstatus Warga Negara Asing.<sup>64</sup>

## **2.2 Kondisi Perekonomian Etnis Asing Tahun 1956-1959**

Perekonomian etnis asing pada tahun 1956-1959 tampak pada kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian, yaitu dengan berusaha melindungi pribumi dari para pengusaha etnis asing. Pemerintah mencanangkan demikian karena etnis asing mendominasi sektor-sektor ekonomi modern.<sup>65</sup> Perkembangan Usaha etnis Tionghoa terus terlihat walaupun pada masa kolonial, perekonomian dikuasai oleh Belanda. Etnis Tionghoa memanfaatkan posisinya sebagai perantara

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>63</sup> M. Syaiful, dkk. Kebijakan Ekonomi Cina Pada Kebijakan Alibaba (*Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 4(2) 2021), hlm116-117.

<sup>64</sup> Lukiyati Ningsih dan Sarkawi B. Husain. Komunitas Tionghoa Dalam Pusaran Politik: Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Mojokerto (*Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya*, 14(2), 2019), hlm. 2.

<sup>65</sup> Waskito Widi Wardodjo, Ekonomi Indonesia 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca-KMB 1949 (*Indonesian Historical Studies*, 2(2), 2018), hlm. 101.

perdagangan antara Belanda dengan pribumi, selain keuntungan berupa materi, mereka memiliki keuntungan berupa keterampilan bisnis. Pengalaman berdagang dan ketekunan mereka yang kemudian menjadikan bisnisnya berkembang pesat.<sup>66</sup> Pedagang perantara mulai terbentuk pada jaman kolonial Belanda, adapun fungsinya ialah untuk menyingkirkan pedagang-pedagang asing.<sup>67</sup> Kegigihan mereka dalam menjalankan bisnisnya ternyata membuahkan hasil yang manis. Bisnis-bisnis berskala besar yang dikuasai oleh etnis Tionghoa sejak jaman pra kemerdekaan telah membuka jalan selebar-lebarnya bagi mereka untuk berkiprah pasca kemerdekaan. Berbekal keterampilan yang didapatnya dari Belanda dan ketekunannya, etnis Tionghoa dengan cepat menguasai usaha-usaha perdagangan di Indonesia. Maka dari itu, perekonomian etnis Tionghoa seringkali menjadi topik pembahasan yang menarik di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>68</sup>

Peran Etnis Tionghoa dalam bidang perekonomian terus berkembang. Mereka terjun dalam bidang ekspor impor. Bisnis etnis Tionghoa juga merambah pada kepemilikan bank-bank swasta dan pada bidang perindustrian, yaitu tekstil. Etnis Tionghoa mampu mengembangkan bisnis mereka walaupun dominasi perusahaan masih dipegang oleh Belanda. Perusahaan yang masih didominasi oleh Belanda diantaranya, industri tekstil, manufaktur, dan perkebunan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa bisnis etnis Tionghoa mampu bersaing dengan dominasi perekonomian Belanda, bahkan bisnis mereka semakin beragam dan tumbuh merajai pasar, mengingat bisnis yang mereka bangun bukanlah bisnis yang berskala kecil.<sup>69</sup>

Kepemilikan bisnis etnis Tionghoa tidak cukup sampai pada bank-bank dan pabrik-pabrik saja. Mereka merambah ke bidang pelayaran yang tidak kalah penting dari bidang lain. Hal ini membuktikan bahwa etnis Tionghoa tidak

---

<sup>66</sup> Yeni Wijayanti, Kebijakan Pemerintah Indonesia Masa Orde Lama Dibidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina (*Jurnal Artefak*, 3(2), 2018), hlm. 113.

<sup>67</sup> Irwanti Said, Hubungan Etnis Cina Dengan Pribumi (Sebuah Tinjauan Sosiologis) (*Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, Edisi 2 Mei 2019), hlm. 7.

<sup>68</sup> Ali Padang Siregar, Perilaku Ekonomi Etnis Cina di Indonesia Sejak Tahun 1930-an (*Jurnal Education and Development. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 6(3), 2018), hlm.6.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

langsung puas dengan apa yang telah dicapainya. Mereka terus mengembangkan usaha seluas-luasnya. Indikator dari kemajuan usaha etnis Tionghoa terletak pada status kerja yang awalnya merupakan pekerja buruh kasar menjadi pekerja buruh halus. Hal ini karena mereka yang pada awalnya hanya bekerja menggunakan tenaga, kemudian berkembang menjadi bekerja menggunakan keterampilan. Sehingga secara otomatis mengangkat kedudukan mereka di lingkungan pekerjaan maupun di lingkungan sosial. Maka dari itu, etnis Tionghoa seringkali dipandang memiliki status sosial yang lebih tinggi di kalangan masyarakat. Pekerja yang menggunakan keterampilan bahkan harus mengenyam pendidikan tinggi, misal menjadi dokter, guru, wartawan, dll. Perekonomian etnis Tionghoa terutama pada tahun 1957 sampai tahun 1958 semakin memperlihatkan eksistensinya, yaitu dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah pada masanya serta persaingan dengan perusahaan lain, meski demikian, usaha mereka masih mampu bertahan.<sup>70</sup>

Pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, etnis Tionghoa dengan cepat mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Meskipun nasionalisasi perusahaan Belanda banyak dilakukan oleh pribumi, namun realita bahwa perusahaan harus dikendalikan dengan keterampilan dan pengalaman yang mumpuni serta kepemilikan modal yang besar, sehingga perusahaan yang telah dinasionalisasi tetap berdiri dan berjalan lancar bahkan berkembang. Kenyataan inilah yang membuat etnis Tionghoa berhasil mengambil alih perusahaan Belanda. Bisnis-bisnis mereka terus berkembang ke berbagai sektor. Sementara itu, orang-orang Tionghoa tingkat ekonomi menengah mereka memiliki kios-kios kecil. Sehingga tampak jelas bahwa dominasi ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia meliputi perusahaan yang berskala nasional sampai kios-kios kecil. Keberhasilan bisnis mereka dengan mengambil alih perusahaan-perusahaan besar Belanda yang dinasionalisasi, walaupun kondisi ekonomi Indonesia tidak menguntungkan mereka.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

Pada tahun 1950-an hampir semua toko di Indonesia pemiliknya merupakan etnis Tionghoa. Mulai dari toko kelontong, toko bangunan, hingga toko makanan. Hal tersebut dibenarkan oleh pengamat budaya Betawi, Alwi Shahab yang menyatakan bahwa pada masa mudanya di daerah Kwitang, Jakarta Pusat, pusat perekonomian di Jakarta betul-betul bergantung pada pengusaha etnis Tionghoa.<sup>72</sup> Realita tersebut menunjukkan bahwa dominasi perekonomian etnis Tionghoa di Indonesia telah terjadi sejak jaman kolonial Belanda. Kemudian secara konsisten mereka mempertahankannya pasca kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di Indonesia sering membidik etnis Tionghoa sebagai sasarannya. Meski demikian mereka dengan cepat bangkit dan berkembang kembali. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi mereka dalam menjalankan bisnis tidak terpengaruh oleh hal-hal lain.<sup>73</sup> Dominasi etnis Tionghoa juga dapat dilihat di daerah-daerah Pulau Jawa. Menurut sejarawan Onghokham, etnis Tionghoa mendominasi perekonomian dengan menguasai jalan-jalan utama dari berbagai kota di Jawa. Jalan tersebut diantaranya di Yogyakarta mereka menguasai Jalan Malioboro, di Semarang menguasai Jalan Pemuda, dan terdapat pula di Mojokerto menguasai Jalan Majapahit.<sup>74</sup>

Dominasi usaha etnis Tionghoa di Mojokerto dapat dilihat dari berdirinya industri rokok. Industri rokok tersebut didirikan pada tahun 1949 oleh Sarutomo yang diberi nama Bokormas. Perjalanan Bokormas menjadi perusahaan awalnya merupakan usaha *home industry* yang didirikan oleh lima bersaudara. Industri rokok Bokormas terletak di Jalan Pahlawan Kota Mojokerto, kemudian berhasil diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja RI Soedomo pada tahun 1985.<sup>75</sup>

Kondisi perekonomian etnis lainnya selain etnis Tionghoa yaitu dapat diketahui dari kegiatan perekonomian di Mojokerto tahun 50-an. Kegiatan

---

<sup>72</sup> Ratna Puspitasari, *Multikulturalisme Dalam IPS: Pengenalan Relasi Etnis Tionghoa Dalam Integrasi Bangsa (Studi Kritis Kajian Gender Antar Etnis di Indonesia)* (*Jurnal Edueksos*, III(2), 2014), hlm. 4.

<sup>73</sup> Ali Padang Siregar, *loc. cit.*

<sup>74</sup> Lukiyati Ningsih dan Sarkawi B. Husain, *Komunitas Tionghoa Dalam Pusaran Politik: Aktivitas Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa di Mojokerto, 1959-1980* (*Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Budaya*, 14(2), 2019), hlm. 4.

<sup>75</sup> Lukiyati Ningsih dan Sarkawi B. Husain, *op. cit.*, hlm. 5-6.



perekonomian didominasi oleh etnis Tionghoa yang berpusat di Jalan Majapahit. Banyak toko-toko yang dimiliki oleh etnis Tionghoa berjejer sepanjang jalan menyediakan berbagai kebutuhan dari mulai kebutuhan primer dan sekunder. Toko-toko tersebut diantaranya menjual kebutuhan pokok berupa bahan makanan dan pakaian, hingga terdapat gedung bioskop. Selain etnis Tionghoa, terdapat pula etnis lainnya seperti India dan Arab, mereka ikut meramaikan kios-kios dagang di tempat tersebut.<sup>76</sup>

Posisi status sosial yang telah dibuat oleh Belanda sejak jaman kolonial yaitu etnis Tionghoa termasuk golongan kedua seolah masih dipertahankannya hingga kini. Kegigihan etnis Tionghoa dalam menjalankan usahanya juga tidak dapat dipungkiri ikut mempengaruhi keberhasilan usaha mereka.<sup>77</sup> Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai oleh etnis Tionghoa ternyata terdapat permasalahan-permasalahan yang semakin menggunung, secara umum permasalahannya yaitu: Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang banyak dinasionalisasi oleh pribumi namun kemudian mampu diambil alih oleh etnis Tionghoa karena modal yang besar yang didukung oleh keterampilan dalam menjalankannya, selain itu sejarah kedudukan mereka yang berada pada kelas kedua setelah Belanda telah menempatkan mereka pada posisi yang eksklusif. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan serius yang kemudian seringkali pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut.<sup>78</sup>

Perusahaan asing begitu luas dalam mendominasi perekonomian Indonesia, mereka cukup kuat dalam hal modal serta keterampilan. Mereka menguasai perdagangan besar, seperti ekspor dan impor. Bidang perhubungan seperti yang dimiliki oleh pemerintah yaitu perusahaan pelayaran pemerintah PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) sangat sulit untuk mengatasi monopoli *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), perusahaan pelayaran milik Belanda. Hampir

---

<sup>76</sup> Lukiyati Ningsih dan Sarkawi B. Husain, *op. cit.*, hlm. 4.

<sup>77</sup> Yeni Wijayanti, *op. cit.* Hlm. 114.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

seluruh sektor perekonomian modern di Indonesia sampai akhir tahun 1957 masih dikuasai oleh orang-orang asing. Perwujudan ekonomi nasional akan selalu terhalang selama modal asing masih beroperasi bahkan berkuasa di Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar pemerintah melakukan tindakan Nasionalisasi. Pada 31 Desember yaitu dalam UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.*